

Pertukaran Sosial Elit Pendukung dan Pasangan Calon Pada Pilkada: Studi Kasus Kemenangan SYAHTO Pada Pilkada Tulungagung 2018

Mohammad Hamdan Asrorudin

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

moh.asrordin16040564075@mhs.unesa.ac.id

Agus Machfud Fauzi

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

agusmfauzi@unesa.ac.id

Abstrak

Pemilihan bupati Tulungagung 2018 menjadi ajang kontestasi dua pasangan calon yang terdiri dari calon petahana melawan calon baru sebagai penantang. Proses berjalan sebagai mana mestinya, sampai pada dua minggu sebelum hari pencoblosan calon bupati petahana terkena operasi tangkap tangan KPK. Meskipun terkena kasus korupsi calon petahana masih mampu memenangkan kontestasi dengan selisih suara yang signifikan yaitu 60:40 persen. Trik kemenangan yang digunakan oleh pasangan calon petahana hampir sama seperti kontestasi pada tahun sebelumnya yaitu memanfaatkan relasi sosial baik yang berawal dari hubungan pertemanan sampai hubungan bisnis. Relasi sosial yang kuat memunculkan militansi pendukung yang selanjutnya disebut relawan. Relawan terbentuk dari kesepahaman atas pilihan rasional terhadap pasangan calon bupati. Kesepahaman tersebut di dipengaruhi oleh peran elit yang ada di tengah masyarakat. Namun apa yang menjadi alasan elit masyarakat masih mendukung calon petahana meskipun tercemar integritasnya karena korupsi. Terdapat kemungkinan adanya transaksional atau pertukaran antara elit dengan calon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pertukaran sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data miles dan huberman. Menggunakan sudut pandang Peter M Blau dalam mengupas pertukaran pada dunia politik. Terdapat fakta bahwa antara elit dan calon terjadi pertukaran baik yang sifatnya individu untuk elit sendiri maupun untuk masyarakat atau masa dari elit. Elit memberikan dukungan dan mengkondisikan masa diberikan reward berupa intrinsik (rasa hormat, kasih sayang, pertemanan) maupun ekstrinsik (uang, jabatan, proyek). Namun pertukaran tidak selamanya seimbang. Terdapat elit yang merasa reward yang diberikan tidak sesuai dengan yang disepakati diawal, sehingga elit tersebut membelot dan mengarahkan dukungan ke calon lawan.

Kata kunci: pilkada, pertukaran sosial, pendukung

Abstract

The election of Tulungagung regent in 2018 became a contestation event for two pairs of candidates consisting of incumbent candidates against new candidates as challengers. The process proceeded as it should, until two weeks before the election day of the incumbent regent was hit by the KPK's arrest operation. Although exposed to corruption cases incumbent candidates are still able to win the contestation with a significant vote difference of 60:40 percent. The winning trick used by the incumbent candidate pair is almost the same as the contestation in the previous year, namely utilizing good social relations that begin with friendship to that start with business relations. Strong social relations give rise to supporting

militancy, hereinafter referred to as volunteers. Volunteers are formed from a consensus of understanding of the rational choice of the candidate pair of regents. This understanding is influenced by the role of the elite in the community. But what is the reason for the elite community still supports the incumbent candidate even though his integrity is tainted by corruption. There is a possibility of transactional or exchange between elites and candidates. This study uses a qualitative method with a social exchange approach. Data collection is done by observation, interviews, and documentation and using miles and huberman data analysis techniques. Using the perspective of Peter M Blau in discussing exchange in politics. There is a fact that between the elite and the candidates there are exchanges both of an individual nature for the elite themselves and for the community or the era of the elite. Elites provide support and condition the period of being rewarded in the form of intellectual (respect, affection, friendship) and extrinsic (money, position, project). But the exchange is not always balanced. There are elites who feel the reward given is not in accordance with what was agreed at the beginning, so that the elite defected and directed support to potential opponents.

Keywords: local elections, social exchange, supporters

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sistem pemilihan kepala pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam lingkup eksekutif maupun legislatif yang dilakukan dengan pemungutan suara melalui mekanisme tertentu dan dipilih oleh rakyat. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945 yang mana melibatkan rakyat dalam pemilihan langsung Presiden-Wakil Presiden, legislatif, dan pimpinan daerah (Veneziano 2017). Adapun perangkat pemilihan umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Pemilu. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 memiliki asas Luas, Bebas rahasia,

Jujur, dan Adil atau biasanya disingkat dengan LUBER JURDIL. Asas ini sekaligus menjadi patokan atau pijakan oleh perangkat Pemilu dalam menjalankan tugasnya. Selain perangkat penyelenggara Pemilu salah satu elemen dalam pemilihan umum adalah partai politik. Partai politik merupakan sekumpulan warga negara yang memiliki tujuan sama berkumpul untuk merebut kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan (Budiarjo 2006). Partai berasal dari rakyat seharusnya membawa kepentingan umum tidak hanya golongan saja. Namun pada realitanya partai politik tidak selalu berperan sebagaimana fungsinya. Partai yang seharusnya mampu menjadi agen sosialisasi politik serta menjadi motor kemenangan dalam kontestasi politik dewasa ini kehilangan kemampuan. Hal tersebut dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat yang

menurun. Selain itu partai politik diharapkan serta seyogyanya menjadi agen sosialisasi politik atau pendidikan politik di masyarakat. Namun pada prakteknya partai sisi edukasi politik telah hilang atau terlupakan oleh kader-kader partai (Nadir dan Wardani 2018). Fungsi edukasi tersebut selain memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus menjadi fungsi sosialisasi politik, demi meningkatkan partisipasi politik bagi masyarakat sehingga pemilihan umum tidak hanya sebuah kegiatan pemilihan yang kehilangan substansi dari pemilihan itu sendiri karena tidak dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, yang terkendala oleh berbagai permasalahan (Lisma 2017).

Dewasa ini partai hanya digunakan sebagai batu loncatan politik saja, kader-kader di regenerasi dengan sangat pragmatis dengan mengedepankan jabatan sebagai hasil akhir dari bergabungnya mereka kedalam partai (Nadir dan Wardani 2018). Selain itu politik dianggap sering menimbulkan konflik, dan menjadi komoditas yang paling mudah untuk dikendarai kepentingan atau bahkan paham tertentu. Apa lagi di Indonesia yang memiliki corak multikultur tentu menjadi tantangan tersendiri bagaimana politik tidak makin meperuncing perbedaan tapi bisa lebih akomodatif (Setyawan dan Khotimah 2019).

Sebagaimana yang terjadi di kabupaten Tulungagung tahun 2013 pada saat berlangsungnya kontestasi pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati. Pada kontestasi tersebut diikuti oleh empat pasangan calon yaitu Syahri-Maryoto, Athiyah-Budi, Isman-Tatang, dan Bambang Adiyaksa-Anna Lutfie. Dari keempat pasangan calon tersebut terdapat dua yang memiliki latar belakang partai sama yaitu PDIP. Karena hal tersebut muncul polemik di tubuh partai PDIP karena keduanya yaitu Isman-Tatang dan Syahri-Maryoto keduanya mengajukan diri untuk pencalonan kali ini (Herginasari 2013). Akhirnya PDIP memberikan rekomendasi kepada paslon Isman-Tatang sehingga memaksa Syahri-Maryoto mencari dukungan lain. Syahri-Maryoto (SYAHTO) berinisiatif menghimpun kekuatan dari partai-partai kecil dan mengandalkan relasi sosial yang dimiliki untuk membantu dalam kemenangan. Benar saja dengan mengandalkan relasi sosial dan dukungan partai kecil pun dapat membawa Syahri-Maryoto memenangkan kontestasi. Kemenangan Syahri-Maryoto tak lepas dari peran tokoh sentral yaitu ayahnya yang merupakan seorang terpadang di Tulungagung. Ayah Syahri merupakan elit ekonomi sekaligus seorang aktor botoh (judi) yang cukup terkena dan memiliki relasi luas di Tulungagung. Judi pilkada memang menjadi hal yang lumrah

dilakukan dalam sebuah ajang kontestasi, perputaran uang didalamnya pun tidak sedikit (Fauzi 2017). Jaringan perdagangan dan perbotohan dimanfaatkannya untuk turut membantu kemenangan anaknya dalam kontestasi pilkada saat itu (Herginasari 2013). Partai tidak lagi memiliki andil besar melainkan pemain akar rumput yang dalam hal ini melalui elit masyarakat yang menjadi variabel kemenangan terbesar (Herginasari 2013).

Satu periode berjalan memimpin Kabupaten Tulungagung Syahri-Maryoto mantap untuk kembali mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Bupati 2018. Sama halnya dengan pencalonannya yang pertama pada awal itikad nya untuk kembali berkontestasi sempat mendapat penolakan dari beberapa kader PDIP. Karena Syahri dianggap penghianat partai dan hanya memnafaatkan parpol untuk kepentingan pribadinya tanpa ada sisi militansi dan kesetiaan pada partai. Sempat muncul nama Supriono yang merupakan Ketua DPRD Tulungagung yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Tulungagung digadang-gadang dan didukung oleh kader PDIP untuk naik mencalonkan diri menjadi Bupati Tulungagung. Namun nyatanya PDIP melali sekretaris pusatnya memberikan instruksi sekaligus rekomendasi kepada Syahri untuk kembali mencalonkan diri. Sempat muncul kekecewaan namun menurut Supriono itu

merupakan pilihan terbaik partai melihat kondisi saat itu. Meskipun pro dan kontra menyelimuti namun Syahri mantap melaju dengan tetap menggandeng Maryoto sebagai Calon Wakilnya. Setelah dipastikan maju dengan mengantongi rekomendasi partai lalu skema apa yang akan digunakan SYAHTO, apakah dengan tetap memanfaatkan elit masyarakat dan relasi botoh atau mantap menggunakan mesin partai (Muttakin 2018).

Pada kontestasi keduanya ini SYAHTO menggunakan skema lama dengan menggandeng tim lawas pencalonan pertama. Menurut ketua tim pemenang yaitu Marsono dalam wawancara pada 20 Februari 2020 skema yang digunakan tetap sama dengan menggandeng tokoh masyarakat atau elit dimasing-masing wilayah yang tersebar. Hal diluar dugaan terjadi pada dua minggu sebelum hari pencoblosan, Syahri terkena operasi tangkap tangan KPK bersamaan dengan kepala daerah lain dengan dugaan kasus suap (Muttakin 2018). SYAHTO yang awalnya menjadi calon kuat seketika elektabilitasnya turun serta membuat publik tidak menyangka. Namun ternyata dalam prosesnya SYAHTO mampu memenangkan kontestasi dengan selisih 20% suara dari lawannya (Medistiara 2018).

Politik mampu dibedah dengan berbagai macam perspektif. Salah satunya

penelitian yang berlokasi di Pati pada tahun 2017, pada saat itu sedang berlangsung pemilihan bupati dengan calon tunggal. Pada saat yang sama terjadi gerakan dengan nama GERAM yang mendukung kotak kosong. Gerakan ini diinisiasi karena adanya kekecewaan ditataran elit masyarakat terhadap perpolitikan Pati yang tidak berkembang sehingga seolah memaksa masyarakat untuk memilih calon satu-satunya yang sebenarnya masyarakat pun tidak menyukai calon tersebut. Meskipun gerakan ini kalah namun mampu mempengaruhi 25 persen dari total DPT Pati. Hal tersebut menunjukkan peran elit masyarakat serta pergerakan masyarakat tataran bawah bisa menjadi kekuatan tersendiri di kancah perpolitikan lokal (Widyasari dan Dewi 2019).

Penelitian serupa pernah dilakukan pada masa Pilkada DKI Jakarta 2018. Pada saat itu isu politik identitas muncul dengan sangat kuat pasca salah satu pasangan calon dinilai menistakan agama tertentu dikarenakan video pendek yang menyebar melalui media internet. Meskipun pada awalnya pasangan calon tersebut dominan dan dianggap akan dengan mudah memenangkan kontestasi karena selisih elektabilitas yang signifikan, namun pada akhirnya mengalami kekalahan karena isu politik identitas tersebut diolah dengan kuat dan ditambah dengan turut sertannya

elit masyarakat dalam berkembangnya kasus tersebut (Nurdin 2018).

Penelitian lain terkait fenomena kemenangan paslon SYAHTO ini pernah dilakukan oleh Riska dalam penelitian yang berjudul Rasionalitas Pemilih Bupati Tulungagung pada Pilkada 2018. Hasil penelitian tersebut adalah terdapat berbagai macam alasan seorang pemilih tetap memilih SYAHTO meskipun sudah terjerat kasus operasi tangkap tangan KPK. Ada yang secara kultur keluarga yang merupakan bagian dari partai PDIP, ada yang dikarenakan prestasi yang diperoleh oleh SYAHTO yang selama ini belum ada bupati yang mampu seperti itu memimpin Tulungagung. Terdapat juga pemilih yang menggunakan sudut pandang rasionalitas afeksi yaitu merasa kasihan sudah memimpin dengan baik di tahun sebelumnya namun harus tersandung kasus pada pencalonan keduanya sehingga muncul rasa empati sehingga pemilih memutuskan untuk memilihnya (Agustin dan Fauzi 2019).

Kontestasi Pilkada Tulungagung 2018 memang menjadi fenomena politik yang menarik untuk dibahas. Sebagaimana melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumnya, pada penelitian ini peneliti mencoba mengambil sudut pandang pertukaran sosial Peter M Blau. Peneliti melihat terdapat suatu ikatan antara elit dengan paslon yang mana mengakibatkan

soliditas dan militansi pendukung. Ditambah dengan kepercayaan masyarakat terhadap partai yang menurun sehingga elit masyarakat yang bermain ditataran akar rumput mempunyai posisi yang bagus untuk menghimpun masa. Tentunya terjadi timbal balik yang sepadan diterima oleh elit atas kerja kerasnya menghimpun masa dan memnangkan paslon SYAHTO meskipun sudah terjerat kasus korupsi. Pertukaran seperti apa yang terjadi serta bagaimana pola yang ada dalam pertukaran tersebut menjadi titik fokus peneliti dalam mengulas fenomena ini.

Peneliti mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk pertukaran sosial elit masyarakat pendukung dengan calon pada pilkada Tulungagung 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan pola pertukaran sosial antara elit masyarakat dan Calon dalam hal ini Syahri-Maryoto seta kondisi perpolitikan lokal Tulungagung sebelum dan pasca kemenangan tersebut. Hasil penelitian yang ada diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu menambah khasanah pengetahuan bidang ilmu Sosiologi politik serta mampu mengupas perspektif teori pertukaran sosial dalam bidang politik. Selain itu secara praktis diharapkan mampu menjadi referensi evaluasi proses Pemilu kepala daerah serta menjadi bahan pembelajaran politik

terhadap masyarakat awam. Penelitian ini berbeda dan melengkapi penelitian yang sudah ada dengan melihat politik dari segi pertukaran sosial yang dilakukan oleh pasangan calon maupun tim dengan elit masyarakat pendukungnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pertukaran sosial Peter M Blau untuk mengulas bagaimana pertukaran yang terjadi antara elit pendukung dan pasangan calon dalam pilkada Tulungagung 2018. Penelitian kualitatif merupakan penelitian naturalistik yang digunakan untuk mengungkap bagaimana kondisi sosial di masyarakat tidak berdasarkan angka melainkan pendefinisian (Mulyadi 2013). Teknik analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (Moleong dan Lexy 2007). Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tulungagung. Adapun sesuai dengan konsep elit paretto terdapat beberapa sasaran subjek penelitian yang tersebar di beberapa daerah di kabupaten Tulungagung.

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana peneliti memberikan kategorisasi sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Elit masyarakat baik yang termasuk dalam governing elit maupun non

governing elit yang mendukung pasangan calon SYAHTO dan tim pemenangan pasangan calon. Kedua unsur subjek penelitian tersebut diambil sesuai dengan konsen peneliti tentang pertukaran sosial yang terjadi pada tataran elit pendukung dengan pasangan calon. Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

- Observasi

Observasi menjadi langkah awal yang dilakukan peneliti untuk melihat kondisi masyarakat serta melakukan analisis kondisi awal. Ada beberapa alasan mengapa observasi sangat dimanfaatkan dalam penelitian seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981), teknik observasi sangat memungkinkan bagi peneliti untuk memahami sesuatu yang rumit dari penelitiannya serta memungkinkan untuk menepis keraguan pada peneliti, karena pengamatan menjadi wahana pembuktian secara fisik atau indrawi. Selain itu observasi dilakukan untuk memetakan kondisi awal sebelum peneliti melakukan wawancara mendalam.

- Wawancara

Wawancara peneliti lakukan sesuai dengan kebutuhan data yang peneliti inginkan (Rosaliza 2015). Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagaimana menurut Sugiyon, wawancara dilakukan

secara langsung atau tatap muka dengan narasumber dengan penyusunan pedoman wawancara sebagai acuan pertanyaan apa saja yang akan diajukan dan agar tidak menyeleweng dari tema yang peneliti tampilkan (Sugiyono 2011).

- Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan ketika peneliti melakukan wawancara dan observasi. Dokumentasi dilakukan baik berupa gambar, video, maupun rekaman suara. Hal ini bertujuan untuk melengkapi data penelitian selanjutnya dilampirkan dalam data penelitian.

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman (Sugiyono 2015). Sebagaimana konsep tersebut terdapat beberapa tahap teknik analisis data sebagai berikut:

- Kondensasi data, Pada proses ini data yang didapat akan diolah dan digolongkan berdasarkan klasifikasi-klasifikasi tertentu. Data yang didapat dirangkum, mengambil hal-hal pokok, dan tema inti dari data yang diperoleh.
- Penyajian data, setelah data selesai digolongkan berdasarkan klasifikasi tertentu, selanjutnya data akan disusun secara runtut. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk kalimat deskripsi.

- Penarikan kesimpulan, Ketika proses yang dilakukan terhadap data selesai maka tahap terakhir yang akan dilakukan adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh (Suci 2010).

KAJIAN PUSTAKA

Politik menjadi pembahasan yang selalu menarik untuk dikupas, berbagai perspektif pandangan muncul baik hanya berupa opini atau secara teoritis dan keilmuan dapat terukur. Berbagai teori menjadi acuan untuk mengupas berbagai fenomena politis yang terjadi. Penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan turut membantu untuk memberikan referensi. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Dendy Lukmajati berjudul *Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus di Kabupaten Blora*. Penelitian tersebut mengulas tentang bagaimana terjadi politik uang dalam pemilu yang berada di kabupaten Blora. Masyarakat sasaran politik uang di Blora adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Namun ternyata ada variabel elit masyarakat atau elit politik yang dilibatkan dalam hal ini. Sampai bahkan ada kontrak politik berupa jumlah suara yang dijanjikan dan apa timbal balik yang akan diberikan oleh yang berkontestasi terhadap elit tersebut. Uang menjadi iming-iming

yang lumrah diberikan dari calon ke elit maupun dari elit masyarakat ke masyarakatnya itu sendiri. Elit mampu menggiring opini masyarakat agar dapat dikondisikan sesuai dengan keinginan melalui media uang (Lukmajati 2016).

Kajian terkait pemilihan umum kepala daerah memang sudah banyak dilakukan, namun masih menjadi kajian yang menarik sampai saat ini karena kondisi yang masih sangat dinamis. Kajian pemilihan umum dilakukan melalui berbagai perspektif, sebagaimana yang dilakukan oleh Idil Akbar dalam jurnal *Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran yang berjudul Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia*. Jurnal ini melihat sisi substansial demokrasi yang dijalankan dalam tataran lokal atau daerah. Demokrasi sampai saat ini eksistensinya hanya bersifat monumental (eventual), yang secara nasional dikampanyekan dan diterapkan masih mengalami berbagai kendala bagaimana jika diterapkan pada tataran lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diperoleh dari studi literatur kepustakaan, dokumen, dan pemberitaan media masa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membawa demokrasi secara substansial dalam tataran lokal atau daerah nyatanya cukup sulit. Seharusnya demokrasi tidak hanya berhenti pada tahap prosedural dan monumental saja. Selain itu

jika demokrasi dijadikan cara untuk mencapai kesejahteraan bersama maka penting adanya untuk menjaga kualitas kepemimpinan yang ada. Karena kualitas kepemimpinan akan membawa baik melalui kebijakan maupun program kerja yang seharusnya bertujuan mensejahterakan masyarakat. Proses pemilihan umum kepala daerah menjadi penting dan sangat riskan. Membawa masyarakat untuk mau ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah menjadi tantangan yang dari hari-hari masih menjadi pekerjaan rumah. Tugas besar tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab bersama karena seharusnya sejatinya pemilihan umum kepala daerah adalah untuk kemaslahatan Bersama (Akbar 2016).

Esensi demokrasi selain kebebasan menggunakan hak suara atau berpendapat juga berbicara tentang bagaimana tiap orang dapat menggunakan hak tersebut tanpa memandang status sosial dan gender. Penelitian yang berjudul *Womens Victory's Contest 2019 Election* mengemukakan bahwa dalam demokrasi terdapat unsur kebebasan berpolitik bagi semua orang termasuk bagi perempuan. Salah satu wujud progresifitas perempuan dalam politik adalah turut sertanya dalam pemilihan umum. Selain itu kemenangan tidak hanya berupa jabatan melainkan juga bertambahnya antusias dan kuota

perempuan kursi yang dapat diduduki di pemerintahan (Fauzi dan Listyani 2019).

Kondisi dalam dunia politik memang sangat mudah berubah, tak hanya tentang kalah dan menang dalam sebuah kontestasi melainkan juga antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak demokrasinya. Golongan putih (golput) menjadi contoh dinamika antusiasme memilih di masyarakat, golput merupakan gerakan tidak menggunakan hak suara dalam suatu pemilihan yang disebabkan karena suatu hal. Pada penelitian yang berjudul *Persepsi Mahasiswa Unesa Mengenai Golput Pasca Penayangan Film Sexy Killers* memberikan gambaran bagaimana masyarakat memandang golput sebagai sebuah pilihan yang disebabkan oleh faktor yang masyarakat tidak suka. Pada penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa golput sangat mampu mempengaruhi sebuah kontestasi (Ramadhania, Susanti, Sayyidatul, Anggraeni, dan Fauzi 2020).

Perpektif pandang lain coba ditawarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Laode Umar yang berjudul *Hegemoni Politik dalam Diskursus Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan 2013*. Pada penelitian ini mengungkap bagaimana elit kekuasaan menggunakan media untuk menjadi media hegemoni. Pada tahun 2013 sedang dilaksanakan pemilihan umum kepala

daerah di Sulawesi Selatan. Ditemukan oleh peneliti salah satu media masa di Sulawesi Selatan yaitu Harian Rakyat Sulsel yang memiliki tendensi ke salah satu pasangan calon. terbukti dengan framing pemberitaan yang tidak berimbang serta bahasa-bahasa yang digunakan nampak sekali menggunakan bahasa branding untuk meningkatkan atau mengunggulkan salah satu paslon. Elit dari berbagai lini termasuk dari elit penguasa media digunakan oleh calon untuk melancarkan pemilihan yang sedang dilakukan (Umar 2013).

Pada konteks pemilihan umum bupati Tulungagung terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Riska mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Dalam penelitiannya ini membahas tentang bagaimana pasangan calon petahana yaitu SYAHTO mampu memenangkan kontestasi meskipun dalam kondisi terkena operasi tangkap tangan oleh KPK (Agustin dan Fauzi 2019). Menggunakan pendekatan rasionalitas tindakan Weber penelitian ini menghasilkan 4 hal:

- Rasionalitas Nilai, terdapat masyarakat yang tidak memilih karena melihat ketidakjujuran seorang calon bupati yang ternyata melakukan tindak korupsi
- Rasionalitas Instrumental, terdapat masyarakat yang memilih

dikarenakan pembangunan sangat dirasakan pada periode pertama pemerintahan SYAHTO

- Rasionalitas Afeksi, terdapat masyarakat yang tetap memilih meskipun dalam kondisi paslon terindikasi korupsi karena merasa kasihan dan ada anggapan bahwa paslon menjadi korban politik.
- Rasionalitas tradisional, masyarakat memilih dikarenakan background partai yang sudah secara turun temurun dipercaya baik (Agustin dan Fauzi 2019).

Berbagai perspektif terkait pemilihan umum kepala daerah telah disampaikan melalui berbagai hasil penelitian. Peneliti mencoba untuk melengkapi penelitian yang sudah ada dengan menghadirkan penelitian tentang pemilihan umum kepala daerah dilihat melalui perspektif pertukaran sosial elit pendukung dengan pasangan calon. Studi kasus yang digunakan peneliti adalah fenomena yang terjadi di kabupaten Tulungagung yang mana salah satu calon yang juga merupakan petahana dan kandidat kuat menuju beberapa hari sebelum pencoblosan terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus suap. Uniknyanya meskipun terbukti korupsi namun nyatanya paslon tersebut masih mampu memenangkan kontestasi.

Kondisi tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam cara atau trik seperti apa yang digunakan. Peneliti mencoba membongkar melalui teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh Peter M Blau.. Melibatkan elit-elit masyarakat untuk dijadikan relawan. Motif yang digunakan dalam pencalonan keduanya ini kurang lebih sama sebagaimana yang dikatakan oleh Marsono ketua tim pemenangan dalam wawancara pada 20 Februari 2020. Kepatuhan dan solidaritas serta militansi antar relawan dalam hal ini elit masyarakat yang terbentuk akankah secara cuma-cuma atau terdapat transaksional atau pertukaran didalamnya. Dari penelitian terdahulu tersebut belum ada penelitian sosiologi politik yang menggunakan perspektif teori pertukaran sosial. Adanya penelitian ini agar melengkapi penelitian sebelumnya dengan melihat fenomena sosiologi politik dari perspektif pertukaran sosial yang dilakukan oleh calon maupun tim pemenangan dengan elit pendukung

Elit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang memiliki derajat tinggi atau orang-orang terbaik dan pilihan dalam suatu kelompok (kbbi.kemendikbud.go.id). Menurut Lipset dan Solari elit merupakan seorang yang menduduki struktur masyarakat tertinggi baik dalam bidang pemerintahan, militer, politik, ekonomi, agama, maupun

pekerjaan bebas lainnya (Schoorl 1980). Menurut Pareto dan Mosca, terdapat tiga golongan dalam masyarakat. Pertama, elit yang sedang memerintah. Elit memerintah berarti elit yang sedang menduduki jabatan formal dan memiliki kuasa dikarenakan jabatan formalnya tersebut sehingga dia mampu memiliki pengaruh di masyarakat. Kedua, elit tidak memerintah. Elit tidak memerintah merupakan elit yang tidak dalam jabatan formal namun kuat pengaruhnya di masyarakat. Ketiga non elit atau masyarakat biasa yang tidak memiliki pengaruh kuat dalam kelompoknya (Hagopian dan Regimes 1978)

Gambar 1 : Model penggolongan masyarakat



Sumber: Buku *Movement and Ideology* Hagopian dan Mark N Regimes

Pada periode sebelumnya SYAHTO yang tidak didukung oleh tim besar menggunakan skema mendekati elit masyarakat untuk meminta dukungan dan mengarahkan masa yang dimiliki untuk memilihnya. Terbukti sebagai calon kuda hitam SYAHTO mampu mempercundangi

calon yang lain termasuk calon petahana. Pada periode keduanya ini skema yang dilakukan sam. Elit masyarakat pendukung yang tahun lalu ikut dalam tim kembali dilibatkan dalam pencalonan keduanya ini. Variabel elit memang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Elit memiliki legitimasi yang diberikan oleh masyarakat terhadapnya. Pengaruh yang besar tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Tindakan yang dilakukan elit tentu tidak cuma-cuma melainkan terdapat *reward* sebagaimana pertukaran sewajarnya berlangsung.

Pertukaran merupakan tindakan sosial yang melibatkan individu maupun kelompok dan terjadi hubungan timbal balik atau saling tukar. Salah satu pencetus teori pertukaran sosial adalah Peter M Blau yang memusatkan perhatiannya pada proses pertukaran yang menurutnya proses pertukaran lah yang mendasari hubungan antara individu maupun kelompok. Blau memaparkan urutan empat tahap pertukaran :

- Tahap 1 : Transaksi pertukaran pribadi antar orang
- Tahap 2 : Deferensiasi status dan kekuasaan
- Tahap 3 : Legitimasi dan Organisasi
- Tahap 4 : Oposisi dan Perubahan

Blau menilai pertukaran yang terjadi adalah proses tindakan dan reaksi. Ketika sebuah tindakan dilakukan maka akan muncul reaksi. Tindakan akan semakin hilang jika reaksi yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika individu atau kelompok tertarik satu sama lain maka akan membentuk asosiasi atau ikatan sosial, ketika ikatan awal muncul imbalan atau reaksi atas tindakan dapat memperkuat asosiasi. Namun hal sebaliknya juga akan dapat terjadi ketika imbalan yang diberikan secara terus menerus mulai berkurang intensitasnya sehingga dapat melemahkan asosiasi ikatan. Imbalan bisa berupa intrinsik (kasih sayang, cinta, hormat) bisa juga berupa ekstrinsik (uang, pekerjaan, imbalan fisik) (Ritzer 2008).

Pertukaran pasti terjadi atas sepertujuan kedua belah pihak yang saling bertukar. Ketika satu pihak memerlukan sesuatu pertukaran dari pihak lain namun tidak memiliki sesuatu yang sebanding maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, memaksa orang lain untuk membantunya. Kedua mencari sumber lain untuk dapat mendapat apa yang diperlukan. Ketiga terus menjalaninya meskipun tanpa sesuatu yang diperlukan dari orang lain (Ritzer 2008).

PEMBAHASAN

Dunia politik syarat akan kepentingan baik individu maupun kelompok. Secara substansi memang kepentingan umum harus didahulukan. Namun dalam prakteknya belum tentu kepentingan umum menjadi prioritas. Hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aktor politik, dalam hal ini terbukti pada Pilkada yang terjadi di kabupaten Tulungagung pada tahun 2013 (Herginasari 2013). Partai tidak lagi berperan sentral, bahkan dalam penelitian itu disebutkan bahwa mesin partai sudah mati. Ketidakpercayaan masyarakat yang tinggi berimbas pada partai tidak berfungsi secara maksimal (Herginasari 2013). Dalam hal pengkondisian masa digantikan perannya oleh tokoh masyarakat lokal yang ternyata secara legitimasi lebih kuat dan mampu membawa banyak masa. Hal tersebut terbukti dengan kemenangan Syahri-Maryoto pada periode pertama kontestasinya di tahun 2013. Padahal secara institusi partai, Syahi yang lahir di partai PDIP saat itu tidak mendapat rekomendasi. PDIP justru memberikan rekomendasi pada pasangan calon Isman-Tatang yang dianggap lebih mempunyai dan kemungkinan untuk menang lebih tinggi.. Kondisi tersebut tidak membuat Syahri mundur, dengan menggandeng partai kecil Syahri mendaftarkan diri bersama Maryoto sebagai wakilnya. Selanjutnya

mengandalkan relasi sosial untuk dapat membantu mendapatkan suara. Elit masyarakat dirangkul oleh Syahri saat itu sehingga pergerakannya di akar rumput masyarakat bisa masif. Perbedaan pendapat penentuan calon dalam sebuah kontestasi memang merupakan hal yang lumrah terjadi. Seringkali antara ketua partai dengan kader-kadernya berselisih paham, ketua partai menuntut evaluasi terhadap kader-kadernya yang sudah menjabat dengan memberikan pertimbangan salah satunya militansi terhadap partai (Fauzi, Mudzakir, dan Abdulrahim 2019).

Manurut Masrsono ketua tim pemenang Syahri pada pemilu kepala daerah 2018 dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada 20 Februari 2020 tokoh kuat dan yang mendorong Syahri untuk tetap mencalonkan diri saat itu serta menjamin kemungkinan kemenangan adalah bapak dari Syahri Bernama Dasar. Relasi Dasar sangat kuat ditataran desa dan kecamatan se kabupaten Tulungagung. Karena Dasar merupakan seorang suplier besar sayur dan buah di pasar Induk Tulungagung sehingga tidak heran jika banyak yang mengenal nya. Dasar harus pandai-pandai mencari relasi untuk menjalankan bisnisnya. Selain itu relasi Dasar diperoleh dari kegemarannya bermain judi, namanya cukup tersohor sebagai penjudi ulung yang juga bermain dalam judi

Pilkada .Berangkat dari situ Syahri mencalonkan diri dan memenangkan kontestasi memanfaatkan relasi sosial dan kelompok-kelompok masyarakat.

Seketika kemenangan Syahri mengubah peta dan pola komunikasi politik di Tulungagung. Model konsolidasi warung kopi dan blusukan nge-trend, padahal sebelumnya tidak lumrah dilakukan. LSM berbentuk paguyuban banyak didirikan. Secara tidak langsung kemenangan Syahri pada saat itu turut merangsang berdirinya paguyuban-paguyuban baru yang sengaja didirikan untuk proyek masa politik saja atau memang didirikan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut menurut ES (44) salah satu anggota Panwaslu ketika itu dalam wawancara yang peneliti lakukan pada 25 Februari 2020 memaparkan bahwa LSM menjadi sasaran penggiringan suara yang empuk bagi para politikus. Bagaimana tidak LSM banyak digunakan untuk menggiring masa saja, selanjutnya diberikan janji-janji yang tidak semuanya direalisasikan. Modus yang paling sering muncul adalah dijanjikan tentang pendanaan atau perizinan usaha. Apalagi menurut ES bentuk LSM yang masih paguyuban meskipun sudah terdapat pembagian kerja melalui struktur kerja yang jelas namun corak tradisional sangat terlihat, seperti sistem pengambilan keputusan melalui musyawarah serta militansi tinggi anggota

terhadap paguyubannya. Militansi tersebut yang menarik bagi aktor politik untuk dijadikan ladang memperoleh suara. ES juga menambahkan kondisi ini sebenarnya kurang baik namun Bawaslu dalam hal ini hanya memiliki wilayah kekuasaannya sebatas peraturan yang berlaku saja jadi Bawaslu pun berkeja sesuai tugas, pokok, dan fungsinya saja. Untuk hal-hal yang diluar itu meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan substansi demokrasi Panwas secara kelembagaan tidak dapat menindak ES berpendapat jika perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak hanya menjadi objek politik tapi subjek yang memiliki pemikiran sendiri dan bisa menentukan sendiri arah politiknya.

Transaksional menjadi hal yang sangat lumrah dalam dunia politik. Politik yang sifatnya pragmatis membuat orang yang terjun atau terlibat didalamnya sangat memperhitungkan untung rugi yang diperoleh. Sebagaimana yang dikemukakan Peter M Blau, suatu tindakan akan terus dilakukan apabila reward yang diterima sepadan dengan tindakan tersebut. Jika reward tidak sepadan maka besar kemungkinan tindakan yang awalnya dilakukan akan cenderung berkurang intensitasnya atau bahkan sama sekali tidak akan dilakukan lagi (Ritzer 2008). Jika menurut AS (68) dalam wawancara yang dilakukan pada 10 Februari 2020 istilah timbal balik yang dimaksud biasanya

disebut proyek. Masing-masing pertukaran yang dilakukan dengan masing-masing elit tentu berbeda sesuai kebutuhan baik pribadi maupun kelompok yang lebih luas. AS juga menyatakan bahwa kondisi seperti itu sudah biasa terjadi dan tidak hanya pada kontestasi kali ini saja.

Kemenangan Syahri-Maryoto pada kontestasi pertama membuat PDIP melakukan evaluasi mendalam karena meskipun tidak diusung oleh partai namun Syahri-Maryoto yang berstatus sebagai kader aktif mampu menang. Peran partai seakan mati dan berdampak pada kontestasi berikutnya. Pada kontestasi selanjutnya di tahun 2018 sempat terjadi polemik yang mirip dengan kontestasi tahun 2013. PDIP kembali kebingungan mengeluarkan rekomendasi dikarenakan terdapat dua calon potensialnya yaitu Syahri sebagai petahana dan Supriono sebagai ketua DPRD sekaligus ketua PDIP cabang Tulungagung pada saat itu. Namun akhirnya rekomendasi dari PDIP pusat keluar dan Syahri menjadi satu-satunya calon yang akan diusung oleh PDIP. Timbul kekecewaan dari beberapa kader partai karena merasa jika Syahri merupakan penghianat partai memaksakan maju pada kontestasi sebelumnya meskipun dari partai memberikan rekom pada orang lain. Namun polemik tersebut dapat terselesaikan dan Syahri melenggang pada kontestasi kedua 2018 masih menggandeng

Maryoto Birowo sebagai wakil dan Marsono sebagai ketua tim Pemenangan.

Menurut marsono dalam wawancara yang dilakukan pada 24 Februari 2020, strategi yang digunakan dalam kontestasi kedua ini kurang lebih sama dengan alasan tim pemenangan baik tataran elit maupun akar rumput masih sangat solit sehingga orang-orang yang dilibatkan dalam tim pun juga orang lama. Namun terdapat beberapa hal evaluasi seperti bagaimana kinerja tim dan siapa saja tim yang masih setia dan yang sudah berpindah pilihan. Pertemuan-pertemuan juga rutin dilakukan menjelang kontestasi keduanya. Menurut marsono Syahri tipe politikus yang bermain rapi. Sampai pada saat konsolidasi tempat antara tim satu wilayah dengan wilayah lain pun dipisah untuk menjaga intensitas, efektifitas, dan menghindari resiko.

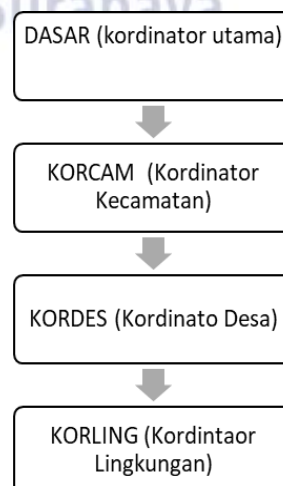
Pemilihan Bupati Tulungagung 2018 menjadi ajang kontestasi yang diikuti oleh dua pasang calon. Pasangan calon pertama terdiri dari mantan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat yaitu Margiono berpasangan dengan seorang publik figur lokal yang merupakan seorang dalang yaitu Eko Prisdianto. Pasangan calon kedua yang merupakan petahana adalah Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo. Dalam prosesnya maju menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati masing-masing didukung oleh partai pengusung, yang mana Margiono-Eko diusung oleh 10 partai

pendukung sedangkan Syahri-Maryoto diusung oleh 2 partai namun berpredikat partai besar atau penguasa di Tulungagung. Proses kontestasi berjalan normal sampai pada dua minggu sebelum pencoblosan Syahri terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Meskipun sudah menjadi tersangka pasangan calon Syahri-Maryoto masih mampu memenangkan pemilihan dengan prosesntase hasil 60: 40 persen. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah struktur tim pemenangnya.

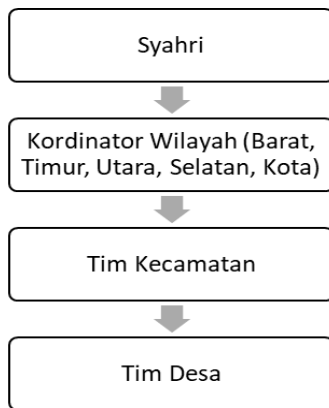
Pada tubuh tim pemenangan Syahri terdapat 3 struktur utama yaitu struktur partai, struktur tim siluman, dan struktur pebotoh. Struktur partai langsung dikomando oleh ketua tim pemenangan yaitu Marsono. Struktur ini menjalankan fungsi formal sebagaimana aturan yang perundang-undangan maupun ketetapan perangkat pemilu yang berlaku. Struktur selanjutnya adalah struktur tim siluman yang dikomando langsung oleh Syahri. Tim ini adalah tim yang beropreasi secara “senyap” memiliki peran sentral dalam pemenangan karena sebagai aktor pemetaan suara dan sekaligus yang memiliki akses langsung ke masyarakat. Tim ini terdiri dari elit masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah di Tulungagung. Menurut pengakuan salah satu tim siluman yang juga merupakan elit masyarakat yang memegang Tulungagung bagian barat yaitu MN (51) dalam peta tim siluman Tulungagung dibagi

menjadi 4 wilayah sebagaimana penjuror mata angin yang masing-masing wilayah terdapat tim didalamnya. Struktur selanjutnya adalah struktur botoh, menurut SB (47) struktur tim siluman memiliki irisan dengan struktur tim botoh. Ada tim siluman yang juga merupakan seorang pebotoh. Botoh sendiri dalam bahasa Indonesia berarti pejudi (kbbi.kemendikbud.go.id). Botohan biasa dilakukan masyarakat di Tulungagung saat ada pemilihan mulai dari pemilihan tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Melibatkan nominal uang yang besar para pemain botoh sekaligus merupakan seorang elit ekonomi berskala kecamatan maupun kabupaten. Struktur tim botoh sangat rapi mulai dari kordinator pusat, kordinator kecamatan, kordinator desa, sampai kordinator lingkungan. Menurut SB botoh lah yang berperan dalam perputaran *money politic* atau politik uang yang ada ketika pemilu. Berikut gambaran struktur tim siluman dan botoh:

Tim Botoh



Tim Siluman



Struktur tim siluman paling banyak melibatkan elit didalamnya. Menurut MN, terdapat beberapa orang selain penguasa wilayah yang ada dalam tim tersebut. Seperti ada dari unsur seniman lokal, penggiat sosial, ketua paguyuban atau komunitas-komunitas yang memiliki masa atau dapat menggiring masa dengan baik. Selain itu ada juga elit kekuasaan yaitu pejabat setingkat desa yang berafiliasi atau turut mendukung dan mengarahkan warganya untuk memilih Syahri namun dilakukan secara implisit atau eksplisit melalui kaki tangan nya.

Sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Pareto mengenai Elit, Pareto membagi elit menjadi tiga bagian yaitu governing elit, non governing elit, dan non elit. Governing elit merupakan elit yang memiliki kekuasaan formal atas wilayah tertentu atau menjabat secara legal atas suatu daerah pada tingkat tertentu. Non governing elit adalah elit diluar pemerintahan dan tidak secara formil mendapat legalitas namun mengantongi

legitimasi dari masyarakat karena dianggap bijak atau mampu memimpin dan mengarahkan (Hagopian dan Regimes 1978).

a) Non Governing Elit

Pada pemilihan kali ini Syahri menggunakan skema yang hampir sama dari pencalonannya diperiode sebelumnya. Relasi sosial yang kuat pada berbagai lapisan masyarakat menjadi kekuatan dan sekaligus faktor kemenangan meskipun dalam kondisi terjat kasus korupsi. Hubungan relasional tersebut terjaga secara harmonis, karena memang ada yang dekat secara emosional sebagai teman maupun sahabat. Ada juga yang merupakan rekan bisnis baik dari rekan bisnis ayah Syahri (Bpk. Dasar) maupun rekan bisnis Syahri sendiri serta rekan paguyuban yang Syahri ikuti.

Selain karena faktor kedekatan emosional terdapat juga faktor transaksional didalamnya. Transaksional yang dimaksud adalah hubungan timbal balik yang mana akan ada aksi reaksi atas hal yang diberikan dan diterima. Jadi terdapat pertukaran yang sepadan atas apa yang dilakukan. Sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Peter M Blau terjad pertukaran apabila terdapat tindakan dan rekasi (Ritzer 2008). Menurut

narasumber (MN) membenarkan adanya timbal balik yang diberikan oleh Syahri kepada masing-masing orang yang dilibatkan dalam pencalonannya. Terkhusus pada elit yang mampu membawa dan mengarahkan masa untuk memilihnya. Timbal balik yang diberikan pun berbeda dari masing-masing orang. Ada timbal balik yang sifatnya untuk individu dan ada yang sifatnya untuk komunal atau kelompok. Menurut SB Syahri secara individu maupun tim tidak menjanjikan secara eksplisit apa yang akan diberikan jika menang, biasanya yang dilakukan syahri adalah menanyakan keperluan apa yang paling mendesak diperlukan olehnya lalu secara diam-diam Syahri akan mencukupi hal tersebut. Sebagaimana konsep pertukaran sosial yaitu seorang melakukan pertukaran karena memiliki tujuan tertentu, social approve adalah bentuk sebuah reward atas apa yang dilakukan (Ritzer 2008). Cara tersebut sudah dilakukan pada pencalonan Syahri di periode pertama dan cukup berhasil terbukti mampu mengikat elit masyarakat pendukungnya untuk tetap berpihak padanya. Selain secara pragmatis terdapat imbalan yang diberikan, polesan kebersihan Syahri serta meskipun terjadi timbal balik tapi tidak ada janji politik dan pemberian reward

dilakukan secara diam-diam yang sebelumnya ditanyakan terlebih dahulu apa yang diperlukan, membuat Syahri dianggap sebagai calon yang jujur dan menumbuhkan kedekatan emosional diantaranya.

Peter M Blau membagi reward atas tindakan yang dilakukan menjadi 2 yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Reward intrinsik bersifat non fisik dan dapat dirasakan sebagai sebuah bentuk perlakuan yang baik seperti rasa hormat dan kasih sayang. Reward ekstrinsik bersifat fisik seperti uang, jabatan, barang (Ritzer 2008). Kedekatan emosional yang terjadi antara Syahri dengan elit masyarakat pendukungnya tercipta karena Syahri tidak hanya memberikan reward ekstrinsik melainkan juga perlakuan atau reward intrinsik yang baik. Menurut MN dan SB meskipun Syahri merupakan petinggi daerah namun tidak kaku dengan selalu menerapkan sesuai protokoler. Bahkan MN sangat biasa bertukar pesan maupun telepon melalui aplikasi chatting whatsapp. Saat pertemuan tim misalnya. Syahri sangat menghormati timnya dengan tidak segan berinteraksi selayaknya teman lama yang sudah lama tidak bertemu menurut SB.

Reward ekstrinsik diberikan secara individu maupun komunal.

Karena elit masyarakat tentu membawa kepentingan orang banyak selain pasti ada kepentingan pribadi yang dibawanya. Terjadi pada MN misalnya, pada periode pertama Syahri mencalonkan reward yang diberikan adalah pembangunan selokan di wilayah tempat tinggal MN. Selain itu juga memberikan bantuan berupa alat produksi kopi dan peralatan untuk keperluan warung kopi bagi anggota paguyuban warung kopi yang digawangi oleh MN. Selain itu Syahri menawarkan pekerjaan kepada anak dari MN yang saat itu sedang membutuhkan pekerjaan. Pada periode kedua pencalonan MN membicarakan terkait pembangunan jalan yang ada di wilayah tinggalnya. Karena selain MN mendengar akan ada trayek transportasi umum tembusan yang akan melewati daerahnya, jalanan yang ada di wilayah tinggal MN memang sudah lama tidak diperbaiki padahal terjadi kerusakan di banyak titik. MN sedikit pesimis dapat terealisasi setelah Syahri tertangkap KPK, padahal MN sudah terlanjur mengkondisikan masa di wilayah Tulungagung barat. Namun disisi lain MN berkeyakinan Syahri hanya korban politik. Setelah kemenangan benar saja meskipun Syahri ditahan namun pembangunan

dan perbaikan jalan di wilayah tinggal MN direalisasi.

Hal yang sama terjadi pada SB, paguyuban PKL miliknya sering diikuti dalam event baik pribadi maupun yang dilaksanakan oleh Pemkab. Selain itu reward ekstrinsik yang didapatkan adalah pemberian hibah dana dari Pemkab serta kemudahan pengurusan surat izin usaha bagi anggota paguyubannya. Meskipun Syahri dibui namun pada awal periode kedua yang saat itu di PLT kan oleh wakilnya Maryoto kemudahan masih diberikan untuk mengurus surat perijinan. Namun pasca ada kasus korupsi kedua yang menjerat beberapa pejabat dinas di Tulungagung nampaknya secara struktur dirombak sehingga kemudahan tersebut tidak diperoleh lagi.

Menurut Blau, tindakan akan tetap dilakukan ketika reward masih sesuai yang diharapkan. Ketika terdapat ketidak seimbangan atau penyalahan kesepakatan maka mungkin terjadi tindakan yang dihentikan (Ritzer 2008). Sebagaimana yang terjadi pada seorang tokoh elit di kawasan Tulungagung kota. AS (68) pada periode pertama pencalonan Syahri merupakan militan pendukung, namun berbanding terbalik pada periode keduanya. AS memilih menjadi oposisi dan mendukung serta membantu secara penuh pasangan calon

pesain Syahri. Benar saja pada area kecamatan Tulungagung Syahri kalah telak padahal pada periode pertamanya menjadi salah satu basis pemilih.

Sikap tersebut diambil AS dengan alasan menurutnya Syahri banyak omong kosong. Pada periode pertama AS secara total mendukung namun nyatanya apa yang dijanjikan akan diberika tidak terwujud. AS menyebutnya sebagai “proyek”. Kekecewaan tersebut membawa AS pada periode keduanya tidak lagi mendukung meskipun sempat pada masa awal konsolidasi AS ikut dan menjadi mata mata untuk kubu lawn Syahri. Pertukaran yang tidak seimbang atau reward yang tidak sesuai harapan membuat tindakan mendukung Syahri tidak lagi dilakukan oleh AS. Pendapat berbeda diungkapkan DASAR (70) yang merupakan kordinator utama botoh sekaligus yang sebelumnya menarik AS kedalam tim pemenangan Syahri. Menurut DASAR proyek sudah diberikan namun AS belum puas, selain itu pada periode kedua pencalonan Syahri AS sudah diberikan materi namun baru diketahui pada pertengahan masa konsolidasi jika dia sebenarnya merupakan pendukung calon lawan.

b) Governing Elit

Status Syahri ebagai petahana tentu sangat menguntungkan. Minimal

sudah ada pengalaman baik dalam kontestasi sebelumnya maupun dalam memerintah kabupaten pada periodenya. Ditambah lagi berbagai pretasi yang di raih oleh kabupaten Tulungagung pada periode pertama Syahri seperti wilayah dengan pemanfaatan dana desa terbaik menurut presiden Jokowi karena mampu memaksimalkan anggaran untuk pembangunan (Idhom 2017). Pamor yang bagus tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Syahri untuk semakin menggait suara masyarakat.

Sebagai petahana Syahri memiliki akses ke pemerintahan baik dari pemda maupun pada jajaran kepala desa yang barang tentu berpengaruh juga dalam kemenangan periode keduanya meskipun sudah terkena kasus korupsi. TH (70) menagminkan hak tersebut dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada 2 Febuaru 2020. TH merupakan salah satu tokoh masyarakat di satu desa berapa pada wilayah administratif kecamatan Kalidawir. Desa ini memiliki kepala desa yang aktif serta berhasil menorehkan prestasi dan kesan baik juga di masyarakat. Menurut TH masyarakat menyukai kepala desa karena sikap nya yang tanggap dan kerja nyata. Sejalan dengan hal tersebut, sempat tersiar kabar bahwa kepala desa memiliki kedekatan dengan Syahri dan pada pencalonan kedua nya menurut TH

kepala desa mendukung Syahri dan mengatakan bahwa dia akan mundur dari jabatannya apabila pada periode kedua Syahri tidak lagi menjabat sebagai bupati.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh TH, beliau yang juga merupakan orang kepercayaan kepala desa mengungkap bagaimana kondisi pada saat itu. Kepala desa tidak secara eksplisit mengarahkan suara untuk memilih Syahri, namun secara implisit melalui pernyataannya tersebut bahwa kepala desa menyatakan memilih dan ancaman untuk mundur dari jabatannya merupakan upaya untuk mengarahkan warga satu desa dengannya. Menurut TH kepala desa memilih Syahri meskipun mengetahui bagaimana perkembangan kasus yang terjadi karena telah dibantu lewat pembangunan di desa.

Menurut TH kepala desa menggunakan skema tersebut bertujuan agar apabila Syahri terpilih kembali pembangunan di desa bisa semakin lancar. Untuk menekan gejolak warga menurut TH kepala desa juga membatasi jumlah caleg yang akan masuk dan mencari suara ke desanya baik secara individu datang maupun melalui tim. Upaya tersebut agar masyarakat desa tidak banyak terpengaruh pilihannya. Kepala desa mengandalkan tangan kanannya bernama MK (55) yang juga

merupakan ketua linmas desa untuk membantu dan mengkonsolidasikan ke masing-masing tokoh masyarakat di desa. Menurut TH timbal balik yang didapat adalah berupa proyek pembangunan desa. Pembangunan jalan aspal misalnya, desa ini cenderung lebih cepat disetujui pengajuannya dan realisasinya dibanding- desa-desa lain.

Pada kontestasi 2018 pertukaran terjadi secara instruksi dan ekstrinsik. Dari elit yang dilibatkan semuanya mengatakan bahwa merasa dihormati dan harga tidak hanya sebagai rekan politik saja. Secara ekstrinsik terdapat beberapa pertukaran yang diberikan ke masing-masing elit baik diberikan ke pribadinya maupun kepada kelompok yang dibawa elit tersebut. Berupa proyek, lapangan pekerjaan, bantuan peralatan usaha, dan kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Reward tersebut diberikan setelah tindakan berupa penggiringan masa untuk melakukan pilihan politik kepadanya.

Pola pertukaran yang terjadi ada yang sebelum pilkada berlangsung ada yang sesudah pilkada selesai dilaksanakan. Pertukaran intrinsik berupa rasa penghormatan dan keerratan pertemanan dibangun sebelum pilkada berlangsung, bertujuan untuk mensolidkan tim dan membentuk

keasadaran bahwa hubungan yang terjadi tidak hanya sekedar hubungan bersifat politis. Selain pertukaran intrinsik, terdapat pertukaran ekstrinsik yang juga diberikan sebelum pilkada berlangsung. Berupa bantuan-bantuan kecil seperti peralatan usaha dan sembako yang kemudian dari elit akan disalurkan ke masyarakatnya. Untuk pertukaran ekstrinsik yang sifatnya besar berupa pembangunan fasilitas umum seperti irigasi maupun infrastruktur jalan serta proyek yang sifatnya untuk individu elit diberikan setelah pilkada selesai.

Namun ternyata tidak semua reward yang diberikan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, sejalan dengan pendapat Peter M Blau bahwa reward akan selalu diberikan jika tindakan secara kontinyu dan intensitasnya stabil. Terdapat elit yang pada akhirnya tidak mendapat reward sebagaimana perjanjian namun dari sisi calon mengatakan jika sudah diberikan dan elit itu yang menginginkan lebih. Sehingga yang terjadi adalah elit tidak melakukan tindakan sebagaimana mestinya dan reward yang diberikan pun tidak diberikan.

Pasca pilkada 2018 kondisi perpolitikan di Tulungagung berubah. Para pemain politik tidak lagi sepriyayi dulu dengan lebih sering turun ke

masyarakat. Konsep Blusukan memang sedang populer diterapkan karena dianggap mampu memberikan citra pemimpin yang merakyat. Selain itu partai politik semakin kehilangan tarungnya dan tidak lagi menjadi variabel penentu kemenangan dalam sebuah kontestasi.

PENUTUP

Hubungan antar individu maupun kelompok tidak lepas dari adanya pertukaran sosial, dalam berbagai lini kehidupan termasuk dalam konteks perpolitikan. Salah satu contoh terjadi pada pemilihan bupati Tulungagung 2018. Meskipun calon bupati terkena operasi tangkap tangan KPK namun masih mampu memenangkan kontestasi dengan selisih suara yang signifikan. Hal tersebut tidak lepas dari peran elit didalamnya yang juga merupakan tim pemenangnya pada pencalonan periode sebelumnya.

Periode pencalonan sebelumnya memberikan dampak besar selain secara individu calon maupun dalam peta perpolitikan lokal Tulungagung. Pada pemilu periode sebelumnya tepatnya di tahun 2013 partai kehilangan tarungnya sebagai mesin kemenangan dalam pemilihan umum. Peran partai tergantikan atau dapat ditutup oleh peran dari masyarakat akar rumput yang notabene nya merupakan tokoh

msyarakat atau elit yang berada di lokal wilayah di Tulungagung.

Terjadi pertukaran baik ekstrinsik maupun intrinsik sebagaimana yang dikemukakan oleh Blau dalam proses pencalonan Syahri-Maryoto pada periode pertama yang berdampak pada pencalonan pada periode kedua. Ada pertukaran yang dianggap seimbang pada periode pertama dan menimbulkan tindakan dukungan yang sama pada periode kedua. Ada juga pertukaran yang tidak seimbang sehingga terdapat elit pendukung yang tidak lagi melakukan tindakan mendukung sebagaimana periode pencalonan pertama. Tindakan akan selalu berbanding lurus dengan reward atau timbal balik yang diberikan, sehingga misalkan reward tidak sesuai harapan maka tindakan tiak akan lagi dilakukan.

Daftar Pusataka

- Agustin, Riska Sari, dan Agus Machfudz Fauzi. 2019. "Rasionalitas Pemilih Bupati Tulungagung pada PILKADA Tahun 2018." *Jurnal Paradigma Sosiologi UNESA* 7(9):1–6.
- Akbar, Idil. 2016. "Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)." *Jurnal Wacana Politik* 1(2).
- Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Fauzi, Agus M., dan Refti Handini Listyani. 2019. "Women ' s Victory Contest 2019 Election." 383(Icss):378–83.
- Fauzi, Agus Machfud. 2017. "Hegemoni Pejudi Dalam Pilkada Di Indonesia." 10(2):16–23.
- Fauzi, Agus Machfud, Moh Mudzakir, dan Mohamed Omar Abdulrahim. 2019. "Social Conflict In Contestation Of Indonesia Election." *The Journal of Society and Media* 3(2):159.
- Guba, E. ..., dan Y. .. Lincoln. 1981. "Effektif Evaluation. Improving The Usefulness Of Evaluations Result Through Responsive And Naturalistic Approaches." *Jassey-Bass Inc. Publisher*.
- Hagopian, dan Mark N. Regimes. 1978. *Movement and Ideology*. New York: Longman Inc.
- Herginasari, Putri. 2013. "MATINYA MESIN PARTAI POLITIK (Studi Kasus Pencalonan Syahri Mulyo dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung 2013)." *Jurnal Cakrawala*.

- Idhom, Adi M. 2017. "Jokowi Puji Penggunaan Dana Desa di Tulungagung dan Jembrana." Diambil (<https://tirto.id/jokowi-puji-penggunaan-dana-desa-di-tulungagung-dan-jembrana-cyZg%0D>).
- Lisma, Lita Tyesta A. L. .. 2017. "Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015)." *Law Reform* 13(1):86.
- Lukmajati, Dendy. 2016. "Praktek Politik Uang Pemilu Legislatif 2014 (Study Kasu di Kabupaten Blora)." 7(1).
- Medistiara, Yulida. 2018. "Baru Dilantik Bupati Tulungagung Tertangkap KPK Langsung Non Aktif." Diambil (<https://news.detik.com/berita/4228310/baru-dilantik-bupati-tulungagung-tersangka-kpk-langsung-nonaktif>).
- Moleong & Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja rosda karya.
- Mulyadi, Mohammad. 2013. "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15(1):128.
- Muttakin, Adhar. 2018. "Puti Turun ke Tulungagung, Patok Kemenangan di Daerah Mataraman." Diambil 12 Maret 2020 (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3886044/puti-turun-ke-tulungagung-patok-kemenangan-di-wilayah-mataraman>).
- Nadir, dan Yuli Win Wardani. 2018. "Genderang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia sudah." 3(1):126–41.
- Nurdin, Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali. 2018. "POLITIK IDENTITAS DAN REPRESENTASI POLITIK (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)." *Jurnal Studi Agama-Agama* 1(1):34–47.
- Ramadhania, Dwi, Maya Dwi Susanti, Bilqis Sayyidatul, Nina Anggraeni, dan Agus Machfud Fauzi. 2020. "5 12345." 05(01).
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rosaliza, Mita. 2015. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam

- Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya* 11(2):71–79.
- Schoorl, Johan Willem. 1980. *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia.
- Setyawan, Katon Galih, dan Kusnul Khotimah. 2019. “Politik akomodatif dalam masyarakat multi agama.” 3(1):1–16.
- Suci. 2010. “ANALISIS DATA KUALITATIF (makalah).”
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Laode Muhammad. 2013. “Hegemoni Politik dalam Diskursus Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan Tahun 2013 (Laode Muhammad Umar).” 2013:103–16.
- Veneziano, Rémi. 2017. “Иновационные подходы к обеспечению качества в здравоохраненииNo Title.” *Вестник Росздравнадзора* 6:5–9.
- Widyasari, Asita, dan Reyke Anggia Dewi. 2019. “Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan.” I(1):89–119.

